

**Wenni Fanni, 0810832015. Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Tahapan Pelaksanaan Pemilu Kada Gubernur Provinsi Sumatera Barat 2010. Dibimbing oleh, Dr. Asrinaldi, M.Si, dan Tengku Rika Valentina, S.IP., MA. Skripsi ini terdiri dari x+115 halaman dengan referensi 12 buku teori, 3 buku metodologi, 1 skripsi, 6 laporan penelitian dan jurnal, 9 media cetak, dan 1 situs internet.**

Pemilu Kada Gubernur hanya dijadikan euforia politik pasca reformasi. Hal ini tidak banyak memberikan pendidikan politik untuk masyarakat, dan bukan tujuan arah demokrasi. Di Sumatera Barat pada pelaksanaan Pemilu Kada Gubernur 2010, para calon berasal dari elit, birokrat, dan pengusaha. Proses pelaksanaan berlangsung tanpa konflik fisik, namun ini belum menjamin bahwa demokrasi telah terlaksana dengan baik dalam Pemilu Kada Gubernur 2010 di Sumatera Barat. Maka dari itu, skripsi ini meninjau bagaimana penerapan prinsip demokrasi dalam tahapan pelaksanaan Pemilu Kada Gubernur Sumatera Barat 2010.

Teori Demokrasi Prosedural menurut Dahl, menjadi landasan skripsi ini. Prinsip demokrasi prosedural ini terdiri dari: Pertama, ketersediaan konstitusi sebagai jaminan demokrasi dengan indikator legitimasi, penegakan *rule of law*, dan kesetaraan politik. Kedua, sistem pemilihan dan partai yang digunakan sebagai mobilitas demokrasi dengan indikator responsibilitas, transparansi dan akuntabilitas. Ketiga pelebagaan politik mengandung 6 unsur lembaga politik yang tidak aboslut dalam penerapannya di tingkat lokal, indikator terdiri dari kontrol agenda, partisipasi, dan pemahaman yang cerah.

Skripsi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus instrumental, serta tipe penelitian deskriptif. Kemudian data dianalisa berdasarkan tipe analisis data eksplanasi. Informan dipilih dengan teknik *purpossive sampling*, dan pengumpulan informasi dengan wawancara mendalam, dari masing-masing pihak yang terkait dalam Pemilu Kada Gubernur Sumatera Barat 2010.

Pada pelaksanaan Pemilu Kada Gubernur di Sumatera Barat 2010 lalu, sudah terlaksana sesuai dengan prinsip demokrasi. Dari aspek konstitusi, Pemilu Kada Gubernur Sumatera Barat 2010 telah dilindungi oleh konstitusi yang menjamin penerapan prinsip demokrasi, yaitu legitimasi, penegakan *rule of law*, dan kesetaraan politik. Seperti halnya di aspek sistem pemilihan dan partai politik, nilai responsibilitas serta transparansi dan akuntabilitas sudah mulai ada dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Kada Gubernur Sumatera Barat 2010. Hal tersebut juga didukung dengan pelebagaan politik yang hampir mendekati indikator dalam unsur-unsur lembaga politik di pemerintahan lokal yang demokratis. Penemuan dari penelitian ini terdapat penerapan prinsip demokrasi yang tidak maksimal, dan praktik yang berbeda. Faktor dari hal tersebut adalah multi tafsir dalam pemaknaan demokrasi pada konstitusi. Kemudian, hal ini berdampak pada kelancaran jalannya sistem pemilihan dan dinamika partai di lokal. Oleh karena

itu, perlu ada pelebagaan politik di daerah sebagai mobilisasi dua aspek tersebut dalam praktik demokrasinya.

Kata kunci : Pemilu Kada Gubernur, Demokrasi Lokal, dan Demokrasi.

## ABSTRACT

**Wenni Fanni, 0810832015. Implementation of Democracy Principle in Governor Election Stage of West Sumatera Province, 2010. The supervisor are Dr. Asrinaldi, M.Si, and Tengku Rika Valentina, S.IP., MA. This thesis consists of x+115 pages with references; 12 book of theory, 3 book of metodology, a thesys, 6 research reports and journals, 9 newspapers, and an internet site.**

The Governor election is used as an euphoria of the post-reform politics. It is not much in giving political education to the community, and it's not the purpose of democracy. This is had happened in West Sumatera in Governor Election 2010, the contestan's from political elite, beureaucrat, and investor. The process had happening without physical conflict, but doesn't mean its guarantee that democracy has been well implemented in West Sumatra Governor Election 2010. of West Sumatera. Therefor, this thesis is looking at how the implementation of democracy principle in West Sumatera Governor Election 2010 stage's.

Dahl's Procedural of Democracy theory, became the foundation of this research. The priciples of democracy,consisted of: First, constitution availability as a warranty of democracy with legitimationindicators, the establishment rule of law, and political equality. Second, election system and party that been used as mobilityof democracy with responsibility and transparency and accountability as indicators. Third, the political institutionalization contained of 6 elements of non absolute political institution for implementation in local level, there are control of process, participation, and a good understanding as indicators.

The research thesis use qualitative approach with type of instrumental case study, as well as the type of description research. The data analysis use explanatory data analysis type. Informants selected by purposive sampling techniques, and the collection of information with in-depth interviews, of each party involved in the election of West Sumatra Governor 2010.

At the passed Governor election 2010 in West Sumatra, has been implemented in accordance with the principles of democracy. From the aspect of the constitution, West Sumatra Governor elections 2010 has been protected by a constitution that guarantees the application of the principles of democracy, which are the legitimacy, the rule of law establishment, and political equality. As well as the aspects of the electoral system and political parties, the responsibility and transparency and accountability already existed in the implementation of West Sumatra Governor Election 2010 stage's. This is also supported by a close political institutionalization of indicators in the elements of political institutions in democratic local government. The findings from this study are the application of the principle of democracy that is not maximal, and different practices. The Factor of it, is the meaning of democracy in a multi-interpretation on the constitution. Then, it's affected for the smooth running of the electoral system and party in the local dynamics. Therefore, there should be political institutionalization in the region as two aspects of the mobilization in democratic practices.

Key words : Governor election, Local Democracy, and Democracy.